

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020



PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Jl. KARTINI NOMOR 2 SINGARAJA

Web : <http://pn-singaraja.go.id> Email : pn singlaraja@yahoo.co.id

Telp / Fax : (0362) 21445 – 26447

PENGADILAN NEGERI SINGARAJA



RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020

JL. KARTINI NO.2, SINGARAJA, BULELENG-BALI

TELP. (0362) 21445, FAX. (0362) 26447

Email : pnsingaraja@yahoo.co.id - Website : www.pn-singaraja.go.id



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA TAHUN 2020

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2020 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Negeri Singaraja Tahun 2020 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Negeri Singaraja dalam rangka mewujudkan Visi yaitu :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA YANG AGUNG”

dengan Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Singaraja
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Singaraja
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Singaraja

Rencana Aksi Perjanjian Pengadilan Negeri Singaraja Tahun 2020 mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir :

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan				
		1. Perdata				
		2. Pidana				
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		1. Perdata				
		2. Pidana				
		c. Persentase penurunan sisa perkara				
		1. Perdata				
		2. Pidana				
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :				
		1. Banding				
		2. Kasasi				
		3. Peninjauan Kembali				
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi				
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan				
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak tepat Waktu				
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi				
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu				
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus				
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan				
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan				
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hokum (Posbakum)				
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				

N O	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	POS BANTUAN HUKUM						Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Pos Bantuan Hukum	48.000.000
	- Belanja Jasa Konsultan								48.000.000
1.	PENDAFTARAN BERKAS PERKARA						Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	37.410.000
	- Belanja Bahan								13.410.000
	- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi								24.000.000
2.	PENETAPAN HARI SIDANG								10.500.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								10.500.000
3.	PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN								56.340.000
	- Belanja Bahan								55.500.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								840.000
4.	MINUTASI DAN UPAYA HUKUM								13.500.000
	- Belanja Bahan								13.500.000
5.	PENGIRIMAN PETIKAN/SALINAN PUTUSAN KEPADA JPU DAN TERDAKWA								10.500.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								10.500.000
6.	PENGIRIMAN SURAT PENAHANAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN								8.250.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								8.250.000
7.	PENANGANAN PERKARA BANDING DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA								28.200.000
	- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat								24.000.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								4.200.000
8.	PENANGANAN PERKARA KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA								3.300.000
	- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat								1.200.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								2.100.000

Ketua



I Wayan Sukamila, S.H., M.H.
NIP. 19640315 199203 1 005